

**PENGARUH OPINI DAN TEMUAN AUDIT BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT PERIODE 2013-2017)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:
Kurnia Dwi Handayani
2015130134

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
Terakreditasi oleh BAN-PT 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2019

***INFLUENCE OF OPINION AND AUDIT FINDINGS
FROM BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TO
REGIONAL GOVERNMENTS FINANCIAL
PEFORMANCES
(CASE STUDY IN REGIONAL GOVERNMENTS OF WEST
JAVA PROVINCE PERIOD ON 2013-2017)***



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted to complete part of the requirements
for Bachelor's Degree in Economics*

By:

Kurnia Dwi Handayani

2015130134

***PARAHYANGAN CHATOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
ACCOUNTING DEPARTMENT***

Accredited based on the decree of BAN-PT

No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018

BANDUNG

2019

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



**PERSETUJUAN SKRIPSI
PENGARUH OPINI DAN TEMUAN AUDIT BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT PERIODE 2013-2017)**

Oleh:

Kurnia Dwi Handayani

2015130134

Bandung, 14 Januari 2019

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T.

Pembimbing Skripsi,

Dr. Elizabeth Tiur Manurung, M.Si., Ak., CA.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Kurnia Dwi Handayani
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 20 Februari 1997
NPM : 2015130134
Program studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Pengaruh Opini dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada pemerintah daerah provinsi Jawa Barat periode 2013-2017)

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan : Dr. Elizabeth Tiur Manurung, M.Si., Ak., CA.

Adalah benar-benar karyatulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UUNo.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,
Dinyatakan tanggal : Januari 2019
Pembuat pernyataan :



(Kurnia Dwi Handayani)

ABSTRAK

Adanya kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri (Otonomi daerah), membuat pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang lebih terhadap kesejahteraan daerahnya. Kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah juga mencakup kebebasan untuk mengatur dan mengelola dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun mengingat begitu pentingnya pengelolaan keuangan bagi suatu negara, maka pemerintah pusat mengeluarkan standar-standar terkait dengan pelaporan keuangan. Selanjutnya untuk menjaga konsistensi pemerintah daerah dalam melakukan pelaporan maka dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaporan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini dan temuan sebagai hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Populasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah di Jawa Barat yang terdiri dari 28 pemerintah daerah. Lalu dari populasi tersebut dipilih secara *purposive sampling* untuk didapatkan sample bagi penelitian ini dan didapatkan 6 pemerintah daerah sebagai sample yaitu Kota Bandung, Bogor, Cimahi, Cirebon, Tasikmalaya, dan Depok. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini dan temuan audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur berdasarkan rasio efektifitas. Namun, opini dan temuan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan jika diukur dengan rasio efisinesi dan kemandirian.

Kata Kunci : Opini audit, temuan audit, kinerja keuangan, rasio efektifitas, rasio efisinesi, rasio kemandirian.

ABSTRACT

The existence of a central government policy that gives freedom to local governments to regulate their own government (regional autonomy), makes local governments have more responsibility for the welfare of their regions. Local governments's freedom includes the freedom to regulate and manage funds owned by local governments. The importance of financial management for a country, make the central government issues standards related to financial reporting. Furthermore, to maintain the consistency of the local government's reporting, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) was formed as an independent institution whose responsible to checks on reports made by the regional government.

This research aims to analyze the influence of opinion and findings as a result of an examination by Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) on the financial performance of local governments in West Java. The type of research used in this study is quantitative research with secondary data. The population of this study is the local government in West Java which consists of 28 local governments. Purposive sampling selected to get a sample for this study and obtained 6 local governments as samples, are the City of Bandung, Bogor, Cimahi, Cirebon, Tasikmalaya, and Depok. The data analysis used in this study is to carry out the classical assumption test and hypothesis testing with multiple linear regression methods.

The results of the study show that the opinions and audit findings have an influence on financial performance as measured by the effectiveness ratio. However, opinions and findings have no influence on financial performance if measured by efficiency and independence ratio.

Key Words : Audit opinion, Audit Findings, Financial Peformance, Effectiveness ratio, Efficiency ratio, Independence ratio

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi yang berjudul “**Pengaruh Opini dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**” (Studi kasus pada pemerintah daerah provinsi Jawa Barat periode 2013-2017) disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan.

Adapun penulis bertanggung jawab penuh atas setiap isi dan penulisan skripsi ini. Penulis menggarap skripsi ini mulai dari cover hingga isi dari skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami berbagai kesulitan dan tantangan baik secara mental dan fisik. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak semua kendala tersebut dapat terselesaikan dengan sangat baik.

Maka dari itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Orang tua yang sudah mendukung penulis dalam banyak hal, baik materil ataupun moral sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
2. Ibu Dr. Elizabeth Tiur Manurung, M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran selama penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Muliawati, SE., M.Si., Ak. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama perkuliahan.
4. Bapak Fernando, SE, M.Kom yang telah membantu dalam pengajuan beasiswa sehingga penulis dapat mengikuti kuliah.
5. Bapak Dodo Sundaka yang telah membantu dalam pengajuan beasiswa sehingga penulis dapat mengikuti kuliah.
6. Bapak Tanto Kurnia, ST., MA. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang telah membantu dalam pengajuan beasiswa sehingga penulis dapat mengikuti kuliah.

7. Ibu Dr. Amelia Setiawan CISA selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
8. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, SE., M.T., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi.
9. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat yang telah memberikan data untuk penelitian
10. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan, pengalaman, dan materi selama kuliah di Universitas Katolik Parahyangan.
11. Yeane Anggraini, Febrian Stia Putra, Vialita Rahmani dan Eligius Alvin yang telah menemani selama penyusunan skripsi ini.
12. Cynthia Gunadi yang telah membantu penulis menyelesaikan syarat kelulusan toefl.
13. Cynthia Gunadi, Yeane Anggraini, Monica Chandra, Ivonne Surya, Levina Maria, Maudy Christia, dan Evangelista Meril yang telah menjadi teman penulis selama berkuliah dan sampai nanti tua.
14. Semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat selesai.

Semoga Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-Nya bagi pihak-pihak diatas dan kebahagiaan selalu menyertai hidupnya.

Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya dan mohon maaf apabila dalam penyusunan maupun penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Semoga penulis dapat memperbaikinya di penulisan selanjutnya.

Bandung, Januari 2019

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	3
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	4
1.4 Kerangka Penelitian.....	5
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Audit	8
2.1.1 Definisi Audit	8
2.1.2 Jenis Audit	8
2.1.3 Jenis Auditor.....	10
2.2 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	10
2.3 Badan Pemeriksa Keuangan	12
2.3.1 Pengertian, Kedudukan, dan Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan.....	12
2.3.2 Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.....	14
2.3.3 Standar Pemeirksaan.....	14
2.3.4 Hasil Pemeriksaan	15
2.3.5 Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan	17
2.4 Kinerja.....	19

2.4.1	Definisi Kinerja	19
2.4.2	Aspek Pengukuran Kinerja	20
2.4.3	Tujuan Pengukuran Kinerja	20
2.5	Keuangan Pemerintah Daerah	21
2.5.1	Pengertian Laporan Keuangan	22
2.5.2	Komponen Laporan Keuangan	23
2.6	Teknik Analisis Kinerja Keuangan	27
2.6.1	Rasio Efektivitas dan Efisiensi Keuangan	27
2.6.2	Rasio Kemandirian	29
2.7	Penelitian Terdahulu	29
BAB 3	METODE PENELITIAN	36
3.1	Metode Penelitian.....	36
3.2	Skema Langkah Penelitian	37
3.3	Populasi dan Sampel	38
3.4	Periode data penelitian	40
3.5	Variabel Penelitian	40
3.5.1	Variabel Bebas/Independen	41
3.5.2	Variabel Terikat/Dependen.....	43
3.6	Jenis dan Sumber Data	45
3.7	Teknik Pengumpulan Data	45
3.8	Pengolahan dan Analisis Data	46
3.8.1	Statistik Deskriptif.....	47
3.8.2	Uji Asumsi Klasik	47
3.8.2.1	Uji Normalitas	47
3.8.2.2	Uji Multikolonieritas.....	48
3.8.2.3	Uji autokorelasi	48
3.8.2.4	Uji heteroskedastisitas.....	48
3.8.3	Analisis Regresi Berganda.....	49
3.8.4	Pengujian Hipotesis.....	50
3.8.4.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	50
3.8.4.2	Uji Parsial (<i>t test</i>)	50
3.8.4.3	Uji Simultan (<i>F test</i>).....	51

3.9 Aplikasi	52
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	53
4.1.1 Opini Audit	53
4.1.2 Temuan Audit.....	55
4.1.3 Rasio Efektifitas	58
4.1.4 Rasio Efisiensi	59
4.1.5 Rasio Kemandirian	60
4.2 Uji Asumsi Klasik.....	61
4.2.1 Uji Normalitas	61
4.2.2 Uji Multikolinearitas.....	64
4.2.3 Uji Heterokedastisitas.....	67
4.2.1.4 Uji Autokorelasi	69
4.3 Analisis Regresi Berganda	71
4.4 Uji Hipotesis.....	75
4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	75
4.4.2 Uji Statistik T.....	77
4.4.3 Uji Statistik F.....	80
4.5 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis	82
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efektivitas.....	27
Tabel 2.2. Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efisiensi.....	28
28	
Tabel 2.3. Ringkasan Penelitian.....	32
Tabel 3.1. Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efektivitas.....	44
Tabel 3.2. Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efisiensi.....	44
Tabel 4.1. Data Statistik Opini Audit (1).....	53
Tabel 4.2. Data Statistik Opini Audit (2).....	55
Tabel 4.3. Data Statistik Temuan Audit (1).....	56
Tabel 4.4. Data Statistik Temuan Audit (2).....	57
Tabel 4.5. Data Statistik Rasio Efektivitas.....	58
Tabel 4.6. Data Statistik Rasio Efisiensi.....	59
Tabel 4.7. Data Statistik Rasio Kemandirian.....	60
Tabel 4.8. Data Uji Normalitas Rasio Efektivitas.....	62
Tabel 4.9. Data Uji Normalitas Rasio Efisiensi.....	63
Tabel 4.10. Data Uji Normalitas Rasio Kemandirian.....	64
Tabel 4.11. Data Multikolinearitas Rasio Efektivitas.....	65
Tabel 4.12. Data Multikolinearitas Rasio Efisiensi.....	66
Tabel 4.13. Data Multikolinearitas Rasio Kemandirian.....	66
Tabel 4.14. Data Uji Heterokedastisitas Rasio Efektivitas.....	67
Tabel 4.15. Data Uji Heterokedastisitas Rasio Efisiensi.....	68
Tabel 4.16. Data Uji Heterokedastisitas Rasio Kemandirian.....	68
Tabel 4.17. Data Uji Autokorelasi Rasio Efektivitas.....	69
Tabel 4.18. Data Uji Autokorelasi Rasio Efisiensi.....	70
Tabel 4.19. Data Uji Autokorelasi Rasio Kemandirian.....	70
Tabel 4.20. Hasil Persamaan Regresi Linerar Berganda Rasio Efektivitas.....	71
Tabel 4.21. Hasil Persamaan Regresi Linerar Berganda Rasio Efisiensi.....	73
Tabel 4.22. Hasil Persamaan Regresi Linerar Berganda Rasio Kemandirian.....	74
Tabel 4.23. Hasil Nilai R Rasio Efektivitas.....	75
Tabel 4.24. Hasil Nilai R Rasio Efisiensi.....	76
Tabel 4.25. Hasil Nilai R Rasio Kemandirian.....	76
Tabel 4.26. Hasil Uji T Rasio Efektivitas.....	77
Tabel 4.27. Hasil Uji T Rasio Efisiensi.....	78
Tabel 4.28. Hasil Uji T Rasio Kemandirian.....	79
Tabel 4.29. Hasil Uji F Rasio Efektivitas.....	81
Tabel 4.30. Hasil Uji F Rasio Efisiensi.....	82
Tabel 4.31. Hasil Uji F Rasio Kemandirian.....	82

DAFTAR GAMBAR

Figure 3 1 Langkah Penelitian	37
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Opini Audit Pemerintah Daerah tahun 2013-2017
- Lampiran 2 Jumlah Temuan Audit tiap pemerintah daerah
- Lampiran 3 Perhitungan Rasio Efektifitas Pemerintah Daerah
- Lampiran 4 Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah
- Lampiran 5 Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah
- Lampiran 6 Contoh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Lampiran 7 Contoh Laporan Resume temuan kelemahan SPI

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan dikeluarkannya UU no 32 tahun 2004 maka secara resmi pemerintah pusat telah mendeklarasikan terkait tentang adanya otonomi daerah. Pemerintah daerah sebagai daerah otonom memiliki kewajiban, hak, dan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri. Salah satu wewenang yang terbesar adalah terkait dengan keuangan. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola kekayaan yang dimilikinya secara mandiri. Oleh karena itu, kesejahteraan keuangan suatu daerah bukan lagi menjadi tanggungjawab pemerintah pusat melainkan merupakan tanggungjawab pribadi pemerintah daerah.

Namun, mengingat begitu pentingnya pengelolaan keuangan bagi suatu pemerintahan, maka pemerintah pusat mengeluarkan standar-standar terkait dengan pelaporan keuangan. Hal ini dimaksudkan agar pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya atas keuangan yang diterima dapat dilaporkan dengan baik. PP No 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan awal baru bagi pelaksanaan prinsip-prinsip keuangan negara yang transparan dan akuntabel. PP No 24/2005 sendiri pernah beberapa kali mengalami perubahan. Hasil perubahan terakhir adalah PP No 71/2010 yang digunakan di sektor pemerintahan. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut diharapkan pemerintah pusat maupun daerah akan menaatinya demi kesejahteraan rakyat umum. Dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya dalam hal mengelola keuangan.

Untuk menjaga konsistensi pemerintahan dalam melakukan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar maka dibentuklah lembaga yang dikhususkan untuk memastikan bahwa laporan keuangan daerah yang telah dibuat sesuai dengan standar yang ada. Lembaga yang memiliki porsi dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan negara ialah Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasa

disebut dengan BPK. BPK merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan semua aset dan kekayaan yang dimiliki negara. BPK dalam menjalankan tugasnya memiliki 34 kantor perwakilan di setiap provinsi. Sehingga hal ini memungkinkan BPK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik dari pemerintah pusat hingga daerah. BPK melakukan pemeriksaan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari dinas-dinas pemerintah daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan hasil perencanaan beserta dengan realisasi anggaran yang telah dibuat. Tak berhenti sampai disitu BPK juga memiliki pemeriksaan yang bersifat operasional dan khusus guna menjaga pengendalian internal yang terbebas dari adanya kemungkinan kecurangan. BPK juga merupakan lembaga yang keberadaannya independen dan terpisah dengan pemerintah, hal ini tentunya dimaksudkan agar dalam melakukan pemeriksaan BPK bersifat objektif dan tidak memihak ke salah satu pihak.

Setelah selesai melakukan pemeriksaan, BPK selalu mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang didalamnya memuat opini dan temuan terkait pemeriksaan. Opini dan temuan yang dikeluarkan terkait dengan laporan keuangan suatu daerah seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah tersebut. Dengan opini dan temuan yang dilaporkan BPK kepada masing-masing pemerintah daerah yang telah diperiksa, diharapkan akan meningkatkan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah ke arah yang positif. Oleh karena itu opini dan temuan merupakan satu-satunya bahan evaluasi yang didapatkan dari BPK, oleh karena itu variabel opini dan temuan dipilih dalam penelitian ini. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik maka akan menggambarkan kesejahteraan suatu daerah yang semakin baik pula. Dengan begitu pelaksanaan otonomi daerah menjadi semakin baik dan bermanfaat bagi pengembangan daerah tersebut.

Dengan melihat ulasan di atas maka menurut peneliti topik terkait BPK dan pemerintah daerah sangat menarik untuk diteliti. Selain itu adanya beberapa hal seperti pertama, adanya ketidak konsistenan hasil dari penelitian sebelumnya yaitu seperti penelitian yang dilakukan oleh Deni Agustiawan (2018), Afrian (2016), Masdiantini dan Erawati (2016), Renas (2014), Sudarsana (2013) dan Sesotyaningtyas (2012). Ketidak konsistenan terjadi pada variabel opini yang diteiti

dimana pada penelitian Deni Agustiawan (2018) opini tidak berpengaruh pada kinerja keuangan sedangkan pada Masdiantini dan Erawati (2016) opini berpengaruh positif signifikan. Pada variabel Temuan penelitian Deni Agustiawan (2018), Afrian (2016), Sudarsana (2013), Renas (2014) didapatkan hasil bahwa temuan tidak berpengaruh sedangkan temuan berpengaruh berdasarkan penelitian Masdiantini dan Erawati (2016). Yang kedua, penelitian sebelumnya hanya melakukan penelitian dengan indikator yang sempit dan periode yang singkat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penelitimencoba untuk lebih memperbanyak indikator yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan daerah dan memperpanjang periode penelitian. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Opini dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah”** (Studi kaspada Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2013-2017).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah opini audit BPK perwakilan Jawa Barat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota Bandung berdasarkan rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian?
2. Apakah temuan audit BPK perwakilan Jawa Barat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota Bandung berdasarkan rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian?
3. Apakah opini dan temuan audit BPK perwakilan Jawa Barat berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efektifitas, esifisiensi, dan kemandirian?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat tujuan dan harapan penulis akan manfaat dari penelitian yang dilakukan bagi beberapa pihak.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah opini audit BPK perwakilan Jawa Barat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota Bandung.
2. Mengetahui apakah temuan audit BPK perwakilan Jawa Barat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota Bandung.
3. Mengetahui apakah opini dan temuan audit BPK perwakilan Jawa Barat berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota Bandung.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yang terkait, antara lain:

1. Bagi BPK-RI Perwakilan Jawa Barat
Dapat lebih memberikan perhatian kepada pelaporan opini dan temuan terkait pemeriksaan daerah kota Bandung di Laporan Hasil Pemeriksaan. Penyajian yang jelas dan detail terkait opini dan temuan yang didapat akan membantu daerah kota Bandung untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangannya.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung
Semakin peduli terhadap opini dan temuan yang dilaporkan BPK-RI perwakilan Jawa Barat dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya. Menjadikan opini dan temuan audit BPK sebagai bahan evaluasi agar kedepannya kinerja keuangan pemerintah daerah kota Bandung dapat semakin baik.
3. Bagi Masyarakat
Memberikan informasi terkait kinerja keuangan daerah kota Bandung, yang merupakan hak setiap warga masyarakat. Dapat menumbuhkan rasa ingin tahu masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menjadi kontrol bagi pemerintah daerah kota Bandung.
4. Bagi Penulis
Menambah informasi penulis terkait analisis dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan BPK-RI Perwakilan Jawa Barat. Memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan di daerah tempat tinggal penulis yaitu Kota Bandung.
5. Bagi Pihak Lain

Merupakan bahan tambahan bukti empiris bagi penelitian sejenis selanjutnya, terkait dengan pengaruh hasil pemeriksaan audit BPK-RI Perwakilan Jawa Barat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota Bandung.

1.4 Kerangka Penelitian

Menurut UU No 23 Pasal 1 ayat 2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada ayat 3 dijelaskan yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Selanjutnya pada ayat 6 dijelaskan mengenai otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat yang memiliki asas otonomi. Asas tersebut mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam melakukan penyelenggaraan daerahnya, namun keberadaannya tetap tidak terpisah dari pemerintah pusat. Dengan adanya kebebasan tersebut maka pemerintah daerah bebas untuk membuat kebijakan terkait daerahnya termasuk dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangannya.

Kinerja menurut Sedarmayanti (dalam Afrian, 2016) diartikan sebagai hasil seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat diukur dengan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Dari kedua definisi di atas maka yang dimaksud sebagai kinerja keuangan pemerintah daerah

adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja keuangan pemerintah daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa rasio untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini yaitu rasio untuk menilai efektivitas, rasio untuk menilai efisiensi, rasio kemandirian untuk menilai kemandirian suatu pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya. Rasio efektivitas akan membandingkan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Semakin mendekati nol maka kinerja keuangan daerah dianggap paling efektif karena anggaran akan sama dengan realisasinya. Rasio efisiensi akan membandingkan realisasi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan (Pendapatan Asli Daerah) PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Melalui rasio efisiensi maka akan diketahui apakah daerah tersebut telah menggunakan dana yang dimiliki secara optimal. Semakin kecil hasil dari rasio efisiensi maka akan menunjukkan bahwa posisi keuangan daerah mengalami surplus bila faktor lain dalam keuangan diabaikan. Dengan begitu dapat mencerminkan kinerja keuangan daerah yang baik. Rasio terakhir adalah rasio kemandirian yang merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan. Hasil perhitungan rasio yang semakin tinggi akan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki porsi yang besar dari keseluruhan pendapatan daerah. Dengan tingkat PAD yang tinggi maka menunjukkan bahwa daerah tersebut dapat secara mandiri membiayai kebutuhan daerahnya dengan pendapatannya sendiri. Selain itu proporsi PAD yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengelola sumber daya yang ada untuk memperoleh pendapatan. Dengan tiga rasio diatas maka dapat dilakukan penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah apakah berada dalam taraf cukup, baik, ataupun sangat baik.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab VIIIA perihal Badan Pemeriksa Keuangan pasal 23E maka dijelaskan bahwa (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu

Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Dari penjelasan tersebut maka pemerintah sebenarnya sangat mengharapkan adanya perbaikan yang terjadi setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Hasil Pemeriksaan berupa opini dan temuan yang tertera pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sebenarnya merupakan media evaluasi bagi pemerintah, dalam penelitian ini yaitu pemerintah daerah kota Bandung. Opini dan temuan yang dikeluarkan BPK diharapkan bukan merupakan laporan tertulis belaka bagi pemerintah daerah namun diharapkan pemerintah daerah secara agresif melakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan BPK. Dengan begitu seharusnya hubungan antara hasil pemeriksaan audit BPK dengan kinerja keuangan daerah tentunya sangat erat. Oleh karena itu melalui penelitian ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh hasil pemeriksaan audit BPK-RI perwakilan Jawa Barat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota Bandung.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :

